

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1979, terjadi peristiwa penting di Iran berupa Revolusi Iran. Revolusi tersebut merupakan respons terhadap pemerintahan otoriter Mohammad Reza Shah Pahlavi, yang telah berkuasa sejak 1941. Dengan dipimpin oleh Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini, pemerintahan baru Iran ini ditandai dengan penekanan kuat pada hukum Islam dan penolakan terhadap pengaruh Barat. Revolusi ini memiliki pengaruh yang signifikan baik terhadap kebijakan dalam maupun luar negeri Iran (Afary, 2024).

Revolusi Iran membawa serangkaian peraturan baru yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat Iran. Di antara perubahan drastis tersebut adalah penegakan hukum dan penetapan standar berpakaian Islami. Perempuan di Iran yang telah menginjak masa pubertas, wajib mengenakan hijab. Hijab dan cadar di Iran dianggap oleh Ayatollah Khomeini sebagai hal yang membedakan antara wanita yang revolusioner (Islamis) dan wanita rezim sebelumnya yang korup atau kebarat-baratan (Shirazi-Mahajan, 1993).

Peraturan mengenai cara berpakaian ini, semula dimuat dalam *Compulsory Hijab Law* pada bulan Maret, 1987, pada Pasal 4 yang berbunyi, “Orang yang tampil di depan umum dengan pakaian atau dandanan yang melanggar Syariah atau mendorong tindakan korupsi atau merusak kesucian publik akan ditangkap, diadili berdasarkan prioritas oleh pengadilan yang sesuai dan, tergantung pada kasusnya, akan dijatuhi salah satu hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.” Adapun Pasal 2 yang dimaksud, berisikan peringatan “bimbingan” dan teguran hingga 40 kali cambukan dan denda hingga 20.000 Rial. Namun, 9 tahun kemudian, terdapat aturan terbaru yang dimuat dalam *Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran* (Undang-Undang Hukum Pidana Islam Republik Islam Iran) pada buku kelima, yang merupakan satu-satunya bagian dari KUHP yang telah diadopsi secara

permanen yang disahkan pada tanggal 22 Mei 1996. Aturan tersebut dimuat pada Pasal 638 dengan catatan yang berbunyi, “Wanita yang tampil di tempat umum dan jalan raya tanpa mengenakan jilbab, diancam dengan pidana penjara sepuluh hari sampai dua bulan atau denda 50.000 sampai 500.000 Rial.” (Iran Human Rights Documentation Center, 2013).

Untuk menegakkan aturan dalam berpakaian, pada tahun 2005 Iran membentuk pasukan khusus yang disebut dengan Polisi Moralitas atau yang dikenal juga sebagai *Gasht-e Ershad* (patroli panduan). Pasukan patrol ini merupakan bagian dari Komando Penegakan Hukum Republik Islam Iran (Zeidan, 2023). Unit patrol tersebut dibentuk oleh mantan presiden Iran, Mahmoud Ahmadinejad. Polisi moral ditugaskan untuk menindak siapa saja yang melanggar hukum berpakaian di Iran.

Namun, dalam praktiknya sendiri, polisi moral seringkali dikritik oleh masyarakat karena dinilai kasar dan keras. Permasalahan utamanya adalah tidak adanya pedoman yang jelas atau rincian mengenai jenis pakaian apa saja yang termasuk dalam kategori tidak pantas. Sehingga hal ini menimbulkan kerancuan dan memicu tuduhan bahwa para polisi moral secara sewenang-wenang menahan perempuan (Ghaedi, 2022). Hal ini merupakan salah satu faktor mengapa masyarakat Iran tidak menyukai kehadiran polisi moral.

Masyarakat Iran hidup di bawah ketakutan akan kekerasan, dari mulai pemukulan hingga penyiksaan oleh para aparat moralitas tersebut. Siapa saja yang tidak memercayai atau mengamalkan nilai-nilai dan batasan-batasan dari Republik Islam dipaksa untuk mematuhi. Moralitas yang ketat ditegakkan di berbagai tempat umum seperti jalanan, sekolah, universitas, dan gedung-gedung publik lainnya (Rouhi, 2022).

Kekerasan yang dilakukan polisi moral, ironisnya memakan korban jiwa. Peristiwa tersebut menimpa seorang gadis asal Kurdistan berusia 22 tahun bernama Mahsa Amini, atau yang dikenal juga dengan Jina. Ia lahir pada 21 September 1999, di Saqqez, Provinsi Kurdistan, Barat Laut Iran. Mahsa Amini atau Jina merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarganya. Jina bersekolah di Taleghani Girls’

High School di Saqqez, lalu lulus pada tahun 2018. Jina baru saja diterima di Universitas Alzahra jurusan hukum, sebelum kematian menimpanya.

Pada 13 September 2022 silam, Jina hendak mengunjungi saudara dan kerabatnya yang berada di Teheran, ibukota Iran. Dia ditangkap oleh polisi moral saat berada di pintu masuk Jalan Tol Shahid Haghani, dikarenakan memakai hijab yang longgar (Ani, 2022). Namun, saksi mata menyebutkan bahwa Jina ditangkap dengan cara yang kasar. Tak hanya itu, saudara laki-lakinya, Kiaresh Amini pun ikut terseret ketika memprotes. Kronologinya, polisi mendorong Jina ke dalam sebuah mobil van dan memukulinya, lalu membawanya ke pusat penahanan Vozara di Teheran. Awalnya, Jina dan Kiaresh diberitahu bahwa mereka hanya dipindahkan ke Vozara dengan dalih untuk mengikuti kelas "pendidikan" yang bertujuan untuk "mereformasi" perilaku perempuan yang melanggar aturan berpakaian Islami di Iran. Mereka sempat memohon agar tidak ditangkap karena tidak mengetahui peraturan di Teheran. Namun, Kiaresh juga dipukuli ketika dia memprotes. Beberapa jam setelah penangkapannya, dilaporkan bahwa polisi moral telah menganiayanya dengan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di dalam mobil polisi, termasuk pemukulan di kepalanya. Beberapa jam kemudian, Jina dibawa ke Rumah Sakit Kasra di Teheran karena mengalami koma.

Tiga hari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 16 September 2022, Jina atau Mahsa Amini dinyatakan meninggal dunia (Amnesty International, 2023). Polisi moral tidak serta-merta menerima tuduhan bahwa mereka menganiaya Jina, dan mengatakan bahwa ia terkena serangan jantung setelah dibawa ke rumah sakit. Ayah Jina dengan keras membantahnya, lantaran putrinya tersebut tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Salah satu pejabat Iran, termasuk Presiden Ebrahim Raisi, menjanjikan investigasi pada kasus tersebut (Chappell & Hernandez, 2022). Ironisnya, setelah kejadian tersebut, keluarga Mahsa Amini sempat dituduh sebagai pendukung kelompok oposisi Kurdi, yang dituduh melakukan separatisme oleh pejabat Republik Iran. Sepupu Jina, yakni Erfan Mortezaei, menegaskan bahwa seumur hidupnya, Jina hanyalah orang biasa yang tidak berpolitik. Ia mengatakan

bahwa rezim telah membuat skenario dan disinformasi mengenai keluarga Mahsa Amini (Foster, 2022).

Kematian Mahsa Amini lantas tidak hanya menggemparkan masyarakat Iran, tetapi juga ke seluruh dunia sehingga menjadi *trending topic* di berbagai media sosial seperti twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya. Bahkan, para selebriti dunia seperti Justin Bieber, Angelina Jolie, Bella Hadid dan masih banyak lagi, turut menyuarakan kejadian ini sehingga peristiwa ini mengundang perhatian khalayak ramai (Rouhani, 2022).

Peristiwa tersebut memicu adanya protes besar-besaran terhadap pemerintah, yang sebagian besar dipimpin oleh para perempuan muda di Iran. Para aktivis mulai menyerukan aksinya di Keshavarz Boulevard pada tanggal 19 September 2022 silam, untuk menuntut penyelidikan atas kematian Mahsa Amini dan pembubaran polisi moral (The Associated Press, 2022). Gelombang protes anti-pemerintah ini belum pernah terjadi sebelumnya, dimana aksi demonstrasi menyebar sangat cepat dengan berbagai tuntutan hak-hak dasar kemanusiaan. Demonstrasi tersebut memiliki slogan "*Woman, Life, Freedom*" atau yang disebut juga dengan *Zan, Zendegi, Azadi*. Gerakan *Woman, Life, Freedom* melibatkan diaspora Iran di berbagai negara seperti komunitas Iran di Universitas California, lalu Ottawa, Kanada, dan bahkan menyebar pesat ke Jerman, Turki, Spanyol, Inggris, Australia, dan negara-negara lainnya.

Gerakan *Woman, Life, Freedom* sendiri menegaskan bahwa hak-hak perempuan adalah hal yang krusial dalam kehidupan dan kebebasan. *Woman, Life, Freedom* melambangkan perlawanan terhadap penindasan dan perjuangan hak-hak perempuan. Slogan ini mengekspresikan gagasan bahwa perempuan harus memiliki kebebasan untuk memilih cara mereka sendiri dalam berpakaian, hidup, dan berpartisipasi dalam masyarakat (Zeidan, 2024).

Gerakan ini adalah gerakan yang terdesentralisasi, yang berarti tidak memiliki pemimpin atau ketua tunggal tetapi digerakkan oleh jaringan aktivis, organisasi hak-hak perempuan, dan para pendukungnya di dalam dan di luar negeri. Media

sosial memainkan peran penting dalam komunikasi dan koordinasi, sehingga memudahkan struktur kepemimpinan yang lebih terdistribusi. Beberapa organisasi yang terkoneksi dengan *Woman, Life, Freedom* yaitu diantaranya adalah Amnesty International, Human Rights Watch, UN Women, dan The International Commission of Jurists (*Iran: A Really Simple Guide to the Protests*, 2022).

Woman, Life, Freedom mengupayakan advokasi transnasional dengan beberapa tuntutan atas keresahannya semenjak kasus Mahsa Amini terjadi, tuntutan tersebut meluas hingga meliputi; Hak perempuan. Di antaranya adalah, hak kebebasan berpakaian, kesetaraan gender di depan hukum, termasuk hak-hak dalam pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Penghentian diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik lainnya. Penghentian kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Reformasi hukum, yang meliputi kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, akhiri penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap aktivis. Lalu, menuntut keadilan untuk Mahsa Amini, yang meliputi, penyelidikan independen atas kematian Mahsa Amini dan penuntutan terhadap mereka yang bertanggung jawab, dan akhiri penggunaan kekerasan berlebihan oleh pasukan keamanan terhadap pengunjuk rasa (*Zan. Zendegi. Azadi. Woman, Life, Freedom.*, 2022).

Dengan demikian, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai upaya-upaya advokasi transnasional maupun gerakan sosial global yang dilakukan oleh gerakan *Woman, Life, Freedom* dalam menegakkan perlindungan hak perempuan di Iran. Maka dari itu, melalui penjabaran latar belakang berupa fenomena dan keadaan yang terjadi, peneliti tertarik untuk menelitinya dengan judul penelitian berupa: “Upaya Gerakan “*Woman, Life, Freedom*” Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Perempuan di Iran”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya gerakan *Woman, Life, Freedom* dalam menegakkan hak-hak perempuan di Iran?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan perumusan masalah yang telah dibuat, maka dibutuhkan adanya pembatasan pokok masalah agar penelitian menjadi lebih fokus dan tidak rancu. Untuk itu pembatasan masalah penelitian ini memfokuskan pada gerakan *Woman, Life, Freedom* di Iran periode tahun 2022-2023, dengan menyoroti apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan *Woman, Life, Freedom* untuk menegakkan perlindungan hak-hak perempuan di Iran. Aksi massa yang masif pada tahun 2022-2023 ini turut memperoleh berbagai dukungan dari organisasi internasional seperti Amnesty International, Human Rights Watch, UN Women, dan lainnya sehingga upaya-upaya pada tahun tersebutlah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis aktivitas gerakan *Woman, Life, Freedom* di Iran.
2. Untuk mengetahui permasalahan hak-hak perempuan di Iran.
3. Untuk menganalisis upaya dan kendala gerakan *Woman, Life, Freedom* dalam menegakkan perlindungan hak perempuan di Iran.

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan mendalam mengenai gerakan *Woman, Life, Freedom* dalam mengatasi isu-isu diskriminasi gender dan menegakkan hak-hak kebebasan perempuan di Iran.

1.4.2.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini digunakan sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.